

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh masing-masing individu, daerah satu dengan lainnya maupun negara satu dengan negara lainnya. Maka dari itu, penting untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu negara untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyatnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana pemerintah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat membentuk kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad, 2017).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengalami transformasi yang signifikan seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, paradigma pembangunan ekonomi lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan fokus utama pada sektor industri dan pembangunan infrastruktur. Namun, seiring dengan berkembangnya pemikiran ekonomi, muncul pandangan baru yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan faktor sosial, lingkungan, serta distribusi kesejahteraan yang merata. Perubahan paradigma ini menuntut pendekatan yang lebih holistik, di mana pembangunan

tidak hanya diukur dari sisi ekonomi semata, tetapi juga dari segi kualitas hidup dan pemerataan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan dapat terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*) (Pratiwi, 2021).

Proses pembangunan ekonomi mempunyai tiga tujuan yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup dan juga perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2006). Untuk mendukung pembangunan ekonomi dibutuhkan peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan yang strategis dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu indikator tingkat keberhasilan dari pembangunan yang telah dilakukan oleh suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Sukirno, 2004).

Menurut teori *trickle down effect* yang pertama kali digagas oleh Albert Otto Hirschman pada tahun 1954 menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes kebawah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menghasilkan kondisi distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata. *Trickle*

down effect merupakan salah satu strategi tidak langsung pembangunan ekonomi untuk pemeratakan kesejahteraan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena proses pemerataan kesejahteraan dilakukan dengan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor utama dan kemudian sektor utama tersebut akan menyebarkan hasil dari pertumbuhan ekonomi kepada sektor lainnya. Maka dengan adanya proses penyebaran ini diharapkan akan membawa perbaikan pada kesejahteraan masyarakat (Larasati, 2017). Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hipotesis ini dikenal sebagai hipotesis “U-Terbalik” Kuznets.

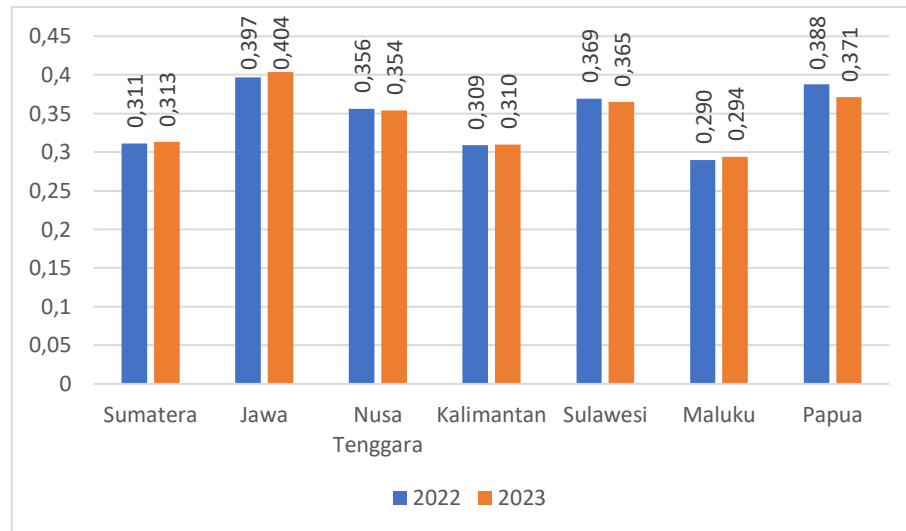
Salah satu yang menjadi tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Artinya pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertumbuhan *output* regional yang dinyatakan dalam pendapatan perkapita yang mendorong kegiatan ekonomi lainnya dan pada akhirnya dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta peluang usaha dalam waktu jangka panjang (Suhada et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi merupakan target yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut Todaro (2004:87) dalam Sayifullah (2021) selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya

tujuan dari usaha pembangunan ialah untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan disertai pemerataan hasil pembangunan. Akan tetapi, pada kenyataannya kutub strategi pembangunan yaitu pertumbuhan dan pemerataan sering kali saling mengabaikan (*trade off*). Artinya pembangunan yang mengutamakan aspek pertumbuhan ekonomi cenderung mengorbankan aspek pemerataan, begitu juga sebaliknya (Arsyad, 2017). Hal ini dikarenakan ada beberapa wilayah yang dapat mencapai pertumbuhan secara signifikan dan ada pula beberapa wilayah lainnya yang mengalami pertumbuhan secara lambat. Wilayah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan pemilik modal (*investor*) yang memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas, serta ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah (Kuncoro, 2004).

Beberapa fakta empiris yang ditemukan dalam berbagai negara berkembang masih ada kontradiksi antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga sejalan dengan melebarnya ketimpangan pembangunan. Hal tersebut tidak hanya menyebabkan ketimpangan pembangunan daerah tetapi juga pada distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait hal tersebut, gini ratio merupakan indikator yang umum digunakan.

Berikut merupakan perbandingan gini ratio antar pulau di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1.1
Perbandingan Gini Ratio Antar Pulau di Indonesia Tahun 2022-2023
(Persen)

Gambar 1.1 menunjukkan nilai gini ratio antar pulau di Indonesia berfluktuatif. Terdapat empat dari tujuh pulau yang ada di Indonesia mengalami peningkatan nilai gini ratio, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, urbanisasi yang cepat, dominasi sektor tertentu dalam perekonomian, serta kebijakan dari pemerintah yang belum optimal. Selain itu, terdapat tiga pulau yang mengalami penurunan nilai gini ratio yaitu Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kombinasi dari pertumbuhan ekonomi yang merata serta kebijakan pemerintah yang inklusif seperti di Pulau Papua dilakukannya pemekaran provinsi untuk memperpendek rentang kendali birokrasi sehingga kebijakan pembangunan lebih spesifik yang pada akhirnya dapat

mengurangi ketimpangan yang terjadi. Berdasarkan gambar 1.1 Pulau Jawa memiliki tingkat ketimpangan tertinggi dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia, dengan angka gini ratio yaitu pada tahun 2022 sebesar 0,397 dan pada tahun 2023 sebesar 0,404. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik (2023), tiga dari enam provinsi di Pulau Jawa menduduki provinsi dengan angka gini ratio tertinggi di Indonesia dan lebih tinggi dari angka rata-rata gini ratio nasional sebesar 0,388. Di antaranya yaitu DI Yogyakarta sebesar 0,449, DKI Jakarta sebesar 0,431, dan Jawa Barat sebesar 0,425.

Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dan salah satu pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya. Terletak di antara Pulau Sumatra dan Pulau Bali, Pulau Jawa memiliki luas sekitar 132.603,59 km² dan dihuni oleh lebih dari 150 juta orang yang artinya sekitar 57% dari total populasi Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Keberagaman suku, bahasa, dan tradisi yang ada di pulau ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Secara geografis, Pulau Jawa dikelilingi oleh Samudra Hindia di sebelah selatan dan Laut Jawa di sebelah utara. Dengan kondisi alam yang bervariasi, mulai dari pegunungan, dataran rendah, hingga pantai, pulau ini memiliki banyak potensi sumber daya alam.

Pulau Jawa merupakan pusat berbagai macam kegiatan di Indonesia. Pulau Jawa juga sering disebut dengan istilah sentris. Istilah sentris ini dikatakan karena Pulau Jawa merupakan sentralisasi pembangunan dan perekonomian. Dalam konteks ekonomi, Jawa adalah jantung industri dan perdagangan Indonesia. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya menjadi pusat inovasi dan aktivitas bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pulau ini juga

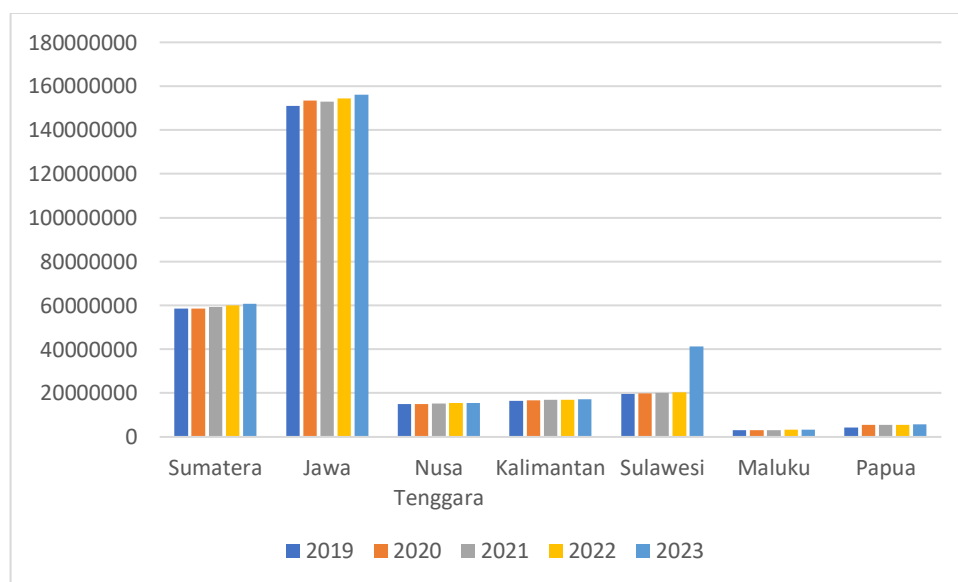
memiliki berbagai situs bersejarah dan wisata alam yang menarik, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang menunjukkan warisan budaya yang kaya.

Pembangunan ekonomi di setiap daerah tidak dapat terlepas dari masalah pertumbuhan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan belum tentu dapat mengatasi masalah ketimpangan antar daerah. Menurut Alesina dan Rodric (2012) dalam Yasa (2015) disparitas pertumbuhan regional dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah semakin meningkat, hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat pembangunan dan pendapatan masyarakat.

Adapun yang dapat menggambarkan ketimpangan adalah perbandingan dari nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar wilayah. PAD erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat, karena PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023) di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 unggul dengan nilai PAD Rp48.860,01 miliar. Dalam Kementerian Keuangan (2019), DKI Jakarta memang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan APBD yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain karena DKI Jakarta merupakan ibukota negara dan sekaligus pusat perekonomian dan bisnis. Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2023 memiliki PAD terendah di Pulau Jawa yaitu senilai Rp2.368,68 miliar, padahal Provinsi DI Yogyakarta memiliki sejumlah objek pariwisata yang begitu banyak dan indah serta merupakan salah satu kota budaya yang paling kaya di Indonesia dan dikenal sebagai pusat seni, pendidikan, dan sejarah. Hubungan antara PAD dan

ketimpangan tergantung pada bagaimana PAD itu dapat dikelola dan digunakan dengan baik, adil, dan efisien oleh pemerintah daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Disamping PAD yang cenderung timpang antar provinsi, jumlah penduduk di Pulau Jawa juga menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas modal manusia dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan rakyat akan menurun dan memicu terjadinya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat (Hutasoit, 2017). Berikut merupakan perbandingan jumlah penduduk antar pulau di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar 1.2.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1.2
Perbandingan Jumlah Penduduk Antar Pulau di Indonesia Tahun 2019-2023
(Jawa)

Berdasarkan gambar 1.2 Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi hal tersebut lebih ditekankan pada efisiensi dan produktivitas dari penduduk tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu banyak serta kepadatan penduduk yang tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi daerah. Kepadatan penduduk juga dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakatnya. Pada daerah dengan kepadatan yang tinggi, usaha meningkatkan kualitas penduduk cenderung lebih sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan (Riung et al., 2024).

Pulau Jawa memiliki perkembangan ekonomi yang cukup tinggi akan tetapi tidak berarti bahwa Pulau Jawa memiliki kesetaraan pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya menyoroti pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa memerhatikan akibat lain yang dapat menyebabkan meningkatnya perbedaan pembangunan antar satu provinsi dengan provinsi lainnya. Perbedaan dalam pembangunan adalah kejadian umum yang terjadi dalam peningkatan perekonomian pada suatu daerah. Pembangunan ekonomi di Pulau Jawa cukup tinggi, akan tetapi ketika pemerintah daerah provinsi tidak mampu mengelola dana secara efektif, kerangka peraturan daerah yang masih buruk, dan realokasi yang rendah antar wilayah satu dengan wilayah lain, justru hal tersebut akan menghambat pembangunan perekonomian daerah bahkan ketidaksetaraan antar daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Sementara PDRB

perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Adapun perbandingan PDRB dan PDRB perkapita yang dapat memperkuat adanya ketimpangan yang terjadi antar provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Penduduk, PDRB, dan PDRB Per Kapita
Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2023

Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB (Miliar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Miliar Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
DKI Jakarta	10.672.100	2.060.967	193.117
Jawa Barat	50.345.190	1.693.389	33.635
Jawa Tengah	37.540.962	1.101.654	29.345
DI Yogyakarta	3.736.480	118.451	31.701
Jawa Timur	41.416.407	1.845.051	44.548
Banten	12.307.740	511.805	41.584

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di Pulau Jawa berada di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 50.345.190 jiwa. Hal ini disebabkan karena Jawa Barat sejak lama menjadi pusat perdagangan dan industri di Pulau Jawa terutama di kawasan Bekasi, Cikarang, dan Karawang sehingga menarik banyak tenaga kerja dari daerah lain. Provinsi yang memiliki PDRB dan juga PDRB perkapita tertinggi di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan menjadi magnet bagi berbagai perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional sehingga konsentrasi aktivitas bisnis ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang

pesat. Selain itu, sektor jasa seperti perbankan, keuangan, perdagangan, dan properti menjadi kontributor utama terhadap PDRB DKI Jakarta dan cenderung menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi daripada daerah lain dengan sektor yang sama.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan tujuan bagi tenaga kerja terampil dari berbagai daerah di Indonesia, kualitas sumber daya manusia yang tinggi mendukung produktivitas ekonomi dan mendorong konsumsi rumah tangga yang besar sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita menjadi relatif tinggi. Disamping itu juga dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur mempunyai nilai rata-rata pendapatan perkapita paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa selain DKI Jakarta yaitu dengan nilai sebesar Rp44.548 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan perkapita terendah di Pulau Jawa terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dengan nilai sebesar Rp29.345 miliar rupiah.

Adanya perbedaan PDRB antar provinsi di Pulau Jawa sebagai indikasi adanya ketidakmerataan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan atau disparitas antar provinsi di Pulau Jawa. Menurut Dumairy dalam Ridho et al., (2022), ketimpangan dan pertumbuhan sering kali menjadi perdebatan antara mendahulukan efisiensi dan pertumbuhan di satu pihak atau mendahulukan efektifitas dan pemerataan di pihak lain. Ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan pembangunan ini merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya. Masalah akan menjadi lebih berat apabila ketimpangan pembangunan semakin besar sehingga menimbulkan terjadinya konflik dan ketidakstabilan di dalam suatu perekonomian.

Menurut Sjafrizal (2012) dalam Islami dan Nugroho (2018) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu perbedaan sumber daya alam, faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan mobilitas barang dan jasa. Daerah dengan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki infrastruktur dan aksesibilitas yang baik cenderung menarik lebih banyak investasi, karena daerah tersebut lebih mudah mengakses peluang untuk berkembang, namun bagi daerah sebaliknya yang kurang beruntung menyebabkan terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbelakangan sehingga dapat memperparah ketimpangan antar daerah dan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, mengindikasikan bahwa Pulau Jawa memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dikenal sebagai Jawa sentris karena merupakan sentralisasi perekonomian dan pembangunan akan tetapi tidak serta merta diikuti dengan pemerataan pembangunan. Maka, diharapkan dengan mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pembangunan dan adanya pengklasifikasian wilayah di Pulau Jawa akan dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan pada gilirannya dapat menanggulangi ketimpangan pembangunan yang terjadi. Dengan demikian, perlunya analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut, sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2014-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2014-2023?
2. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi wilayah di Pulau Jawa tahun 2014-2023?
3. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2014-2023.
2. Untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi wilayah di Pulau Jawa tahun 2014-2023.
3. Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2014-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan

wawasan ilmu pengetahuan terkait ketimpangan pembangunan, pengklasifikasian pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan daerah untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan yang baik di masa mendatang dalam rangka mengurangi dan mengatasi ketimpangan yang terjadi antar provinsi di Pulau Jawa, sehingga ketimpangan pembangunan yang terjadi lebih rendah dan pada akhirnya akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata di setiap wilayahnya.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, dan wawasan khususnya mengenai ketimpangan pembangunan yang terjadi di Pulau Jawa.

4. Bagi Peneliti Lain

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi ataupun rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa pada rentang waktu tahun 2014-2023 dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari *website* resmi Badan Pusat Statistik.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan September 2024. Adapun jadwal penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]